



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
SESUAI PERMENKEU NO. 90





DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	-	-
8	Pajak Rokok		-	-	-	-
9	Retribusi Daerah		2.308.620.000,00	1.995.127.250,00	86,42	3.096.995.340,00
10	Retribusi Jasa Umum		-	-	-	-
11	Retribusi Jasa Usaha		1.648.870.000,00	1.321.299.750,00	80,13	2.196.570.340,00
12	Retribusi Perizinan Tertentu		659.750.000,00	673.827.500,00	102,13	900.425.000,00
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penjualan Modal pada BUMN		-	-	-	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penjualan Modal pada BUMD		-	-	-	-
16	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		11.522.544.000,00	12.617.164.570,00	109,50	8.766.811.860,00
17	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
18	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
19	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
20	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	-	-
21	Jasa Giro		-	-	-	-
22	Hasil Pengelolaan Dana Berqulir		-	-	-	-
23	Pendapatan Bunga		-	-	-	-
24	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	-	-
25	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		11.522.544.000,00	12.549.852.000,00	108,92	-
26	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	-	-
27	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	-	-
28	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	-	-
29	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	62.112.570,00	-	42.448.140,00
30	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	-	-
31	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	-	-
32	Pendapatan BLUD		-	-	-	-
33	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	-	-
34	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	-	-
35	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Berqulir		-	-	-	-
36	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	-	-
37	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	-	-
38	Pendapatan Zakat		-	-	-	-
39	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksaan		-	-	-	-
40	Pendapatan Lain-Lain SKPKD		-	5.200.000,00	-	8.724.363.720,00
41	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		13.831.164.000,00	14.612.291.820,00	105,65	11.863.807.200,00
42						
43	PENDAPATAN TRANSFER					
44	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-
45	Dana Perimbangan		-	-	-	-
46	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	-
47	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	-	-
48	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	-	-
49	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
50	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	-
51						
52	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
53	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
55	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
56	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	-	-
57	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	-	-
58	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	-	-
59	Dana Darurat		-	-	-	-
60	Dana Darurat		-	-	-	-
61	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
62	Lain-lain Pendapatan		-	-	-	-
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	-
64						
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		13.831.164.000,00	14.612.291.820,00	105,65	11.863.807.200,00
66						
67	BELANJA DAERAH					
68	BELANJA OPERASI					
69	Belanja Pegawai		40.309.840.000,00	39.712.785.449,00	98,52	44.552.802.208,00
70	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		20.956.729.000,00	20.361.925.859,00	97,16	21.550.809.614,00
71	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		19.353.111.000,00	19.350.859.590,00	99,99	20.535.892.594,00
72	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	-	-	2.466.100.000,00
73	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-
74	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	-
75	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-	-
76	Belanja Pegawai BOS		-	-	-	-
77	Belanja Pegawai BLUD		-	-	-	-
78	Belanja Barang dan Jasa		119.164.996.000,00	111.039.697.773,00	93,18	81.667.914.723,00
79	Belanja Barang		10.092.307.000,00	9.193.690.949,00	91,10	7.066.177.865,00
80	Belanja Jasa		101.017.948.000,00	94.238.981.769,00	93,29	69.947.466.200,00
81	Belanja Pemeliharaan		2.933.576.000,00	2.788.348.530,00	95,05	1.550.157.617,00
82	Belanja Perjalanan Dinas		5.121.165.000,00	4.818.676.525,00	94,09	3.104.113.041,00
83	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		-	-	-	-
84	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	-	-
85	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
86	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	-
87	Belanja Bunga		-	-	-	-
88	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
89	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
90	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
91	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBK)		-	-	-	-
92	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obliqasi)		-	-	-	-
93	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	-
94	Belanja Subsidi		-	-	-	-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
95	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	-	-
96	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	-	-
97	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	-
98	Belanja Hibah		-	-	-	-
99	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
100	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
101	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	-	-
102	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	-	-
103	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasarakatan yang Berhadan Hukum Indonesia		-	-	-	-
104	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	-	-
105	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-	-
106	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
107	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	-	-
108	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	-	-
109	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	-	-
110	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	-	-
111	Jumlah Belanja Operasi		159.474.836.000,00	150.752.483.222,00	94,53	126.220.716.931,00
112						
113	BELANJA MODAL					
114	Belanja Modal Tanah		23.477.872.000,00	23.149.425.950,00	98,60	323.926.930,00
115	Belanja Modal Tanah		23.477.872.000,00	23.149.425.950,00	98,60	323.926.930,00
116	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		6.154.356.000,00	5.970.262.850,00	97,01	1.630.474.550,00
117	Belanja Modal Alat Besar		552.050.000,00	532.516.100,00	96,46	69.970.000,00
119	Belanja Modal Alat Angkutan		-	-	-	-
120	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-	-	10.600.000,00
121	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	-	-
122	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		678.891.000,00	676.626.750,00	99,67	1.215.839.000,00
123	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		-	-	-	26.822.550,00
124	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-	-	-
125	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-	-	-
126	Belanja Modal Alat Pensejataan		-	-	-	-
127	Belanja Modal Komputer		-	-	-	71.930.000,00
128	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	-	-
129	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	-	196.543.000,00
130	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	-	-
131	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	-	-
132	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	-	38.770.000,00
133	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	-	-
134	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	-	-
135	Belanja Modal Rambu-rambu		4.923.415.000,00	4.761.120.000,00	96,70	-
136	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	-	-
137	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	-	-
138	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		14.815.801.000,00	14.557.722.035,00	98,26	1.910.707.750,00
139	Belanja Modal Gedung		14.815.801.000,00	14.557.722.035,00	98,26	1.910.707.750,00
140	Belanja Modal Monumen		-	-	-	-
141	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	-	-
142	Belanja Modal Tuju Titik Kontrol/Pasti		-	-	-	-
143	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	2.869.167.000,00
144	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-	-	-
145	Belanja Modal Bangunan Air		-	-	-	45.680.000,00
146	Belanja Modal Instalasi		-	-	-	-
147	Belanja Modal Jaringan		-	-	-	2.823.487.000,00
148	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		190.000.000,00	189.523.000,00	99,75	-
149	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		190.000.000,00	189.523.000,00	99,75	-
150	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-	-	-
151	Belanja Modal Hewan		-	-	-	-
152	Belanja Modal Biota Perairan		-	-	-	-
153	Belanja Modal Tanaman		-	-	-	-
154	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	-	-
155	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	-	-
156	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	-	-
157	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
158	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-	-	-
159	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Lain-lain		-	-	-	-
160	Jumlah Belanja Modal		44.638.029.000,00	43.866.933.835,00	98,27	6.734.276.230,00
161						
162	BELANJA TAK TERDUGA					
163	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
164	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
165	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
166						
167	BELANJA TRANSFER					
168	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-
169	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	-	-
170	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-
171	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	-	-
172	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
173	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	-	-
174	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-	-
175	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	-	-
176	Jumlah Belanja Transfer		-	-	-	-
177						
178	JUMLAH BELANJA DAERAH		204.112.865.000,00	194.619.417.057,00	95,35	132.954.993.161,00
179						
180	SURPLUS/DEFISIT		(190.281.701.000,00)	(180.007.125.237,00)	94,60	(121.091.185.961,00)
181						
182	PEMI PEMBIAYAAN DAERAH					
183	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
184	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
185	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-	-	-
186	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-	-	-
187	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-	-	-
188	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
189	Penghematan Belanja		-	-	-	-
190	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan		-	-	-	-
191	Sisa Dana Akiat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Peneluaran Pembiayaan		-	-	-	-
192	Sisa Belanja Lainnya		-	-	-	-
193	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
194	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
195	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
196	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
197	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-
198	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
199	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
200	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
201	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
202	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
203	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	-	-
204	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
205	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
206	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
207	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-	-	-
208	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-	-	-
209	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-	-	-
210	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-	-	-
211	Penerimaan Kembali Dana Berqulir kepada BLUD		-	-	-	-
212	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	-
213	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-	-	-
214	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
215						
216	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
217	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
218	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
219	Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	-
220	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
221	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-
222	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	-	-
223	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
224	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
225	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
226	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
227	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	-	-
228	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
229	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
230	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
231	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-	-	-
232	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-	-	-
233	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-	-	-
234	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-	-	-
235	Pemberian Pinjaman-Dana Berqulir kepada BLUD		-	-	-	-
236	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	-
237	Pinjaman BLUD		-	-	-	-
238	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
239						
240	PEMBIAYAAN NETTO					
241						
242	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(190.281.701.000,00)	(180.007.125.237,00)		(121.091.185.961,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

